PENGARUH PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK INDIVIDU (STUDI KASUS DARI PERSPEKTIF GENDER)

Fitri Kartika Sari¹, Tesa Yulia², Wida Mustia Ningsih³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email: Fitriks.04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap partisipasi politik individu, dengan fokus pada perspektif gender. Hak asasi manusia dan partisipasi politik adalah isu krusial dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Perlindungan HAM yang efektif—mencakup kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan perlindungan dari diskriminasi gender—adalah kunci untuk memastikan partisipasi politik yang merata dan adil bagi semua warga negara. Studi ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana perlindungan HAM memengaruhi tingkat partisipasi politik individu berdasarkan identitas gender mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM yang kuat memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik, terutama bagi perempuan. Hambatan seperti terbatasnya akses terhadap informasi politik, kurangnya kebebasan berbicara dan berkumpul yang aman, serta norma budaya dan stereotip gender, sering kali menghambat partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah kebijakan yang lebih tegas, seperti meningkatkan akses perempuan terhadap informasi politik, memperkuat perlindungan hukum untuk kebebasan berbicara dan berkumpul, serta mengubah persepsi dan norma budaya tentang kesetaraan gender dalam politik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Partisipasi Politik, Gender.

Abstract

This study aims to analyze the influence of human rights protection on individual political participation, with a focus on a gender perspective. Human rights and political participation are crucial issues in building a just and democratic society. Effective human rights protection—which includes freedom of speech, freedom of assembly, and protection from gender-based discrimination—is key to ensuring equitable and fair political participation for all citizens. The study uses a qualitative case study method to explore in depth how human rights protection affects the level of individual political participation based on their gender identity. The research findings indicate that strong human rights protection has a significant impact on political participation, especially for women. Obstacles such as limited access to political information, a lack of safe freedom of speech and assembly, and cultural norms and gender stereotypes often hinder women's political participation. Therefore, this study recommends more decisive policy measures, such as increasing women's access to political information, strengthening legal protections for freedom of speech and assembly, and changing perceptions and cultural norms regarding

gender equality in politics.

Keywords: *Human Rights, Political Participation, Gender.*

PENDAHULUAN

Di tengah dinamika sosial dan politik global saat ini, hak asasi manusia dan partisipasi politik individu menjadi dua isu yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis. Hak asasi manusia merujuk pada hak-hak yang inheren dan tak terpisahkan yang dimiliki setiap individu sebagai anggota dari masyarakat yang demokratis, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Partisipasi politik, pada gilirannya, mencakup segala bentuk keterlibatan individu dalam proses politik, mulai dari pemilihan umum hingga advokasi politik dan pengambilan keputusan.¹ Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak-hak ini berisi tentang kesetaraan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi kunci utama dalam memastikan partisipasi politik yang merata dan adil bagi semua warga negara. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, hak untuk mengakses informasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan berbagai faktor termasuk gender.

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana perlindungan hak asasi manusia berdampak pada partisipasi politik individu, dengan mempertimbangkan perspektif gender. Gender di sini bukan sekadar kategori sosial, tetapi juga lensa analitis yang mengungkapkan bagaimana pengalaman dan akses individu terhadap hak-hak politik dapat berbeda berdasarkan identitas gender mereka. Penekanan pada perspektif gender memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam akses dan penggunaan hak-hak politik mereka, serta bagaimana perlindungan hak asasi manusia dapat mempengaruhi dinamika ini.

¹ Rafiqah, M. O. (2023). HAK ASASI MANUSIA DAN TANTANGAN DEMOKRASI: SUATU PERSPEKTIF TEORITIS. *literacy notes*, 1(2).

Penting untuk dicatat bahwa partisipasi politik yang inklusif dan berkesinambungan adalah salah satu indikator vital dari kualitas demokrasi sebuah negara. Dalam banyak konteks, terutama di negara-negara berkembang, perempuan sering kali menghadapi hambatan yang berbeda dalam memenuhi potensi penuh mereka dalam kehidupan politik, termasuk dalam hal pencalonan, pemilihan umum, dan kebijakan publik. Dalam hal ini, perlindungan hak asasi manusia yang efektif tidak hanya mendukung kesetaraan gender, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara perlindungan hak asasi manusia dan partisipasi politik individu dari perspektif gender. Pendekatan ini akan memungkinkan kami untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik individu berdasarkan jenis kelamin mereka, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi dinamika ini di berbagai konteks lokal.

Dengan demikian, laporan ini bertujuan untuk tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang hubungan antara hak asasi manusia dan partisipasi politik, tetapi juga untuk memberikan landasan empiris yang kuat bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam mempromosikan hak-hak politik individu dari berbagai latar belakang gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian eksplanatori atau penelitian kausal. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Dalam konteks studi ini, penelitian eksplanatori akan menggali bagaimana perlindungan HAM (variabel independen) berhubungan dengan partisipasi politik individu (variabel dependen), dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontrol seperti variabel-variabel sosiodemografis dan politik lainnya. Penelitian kausal mencoba menentukan apakah ada hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam kasus ini, penelitian kausal akan mencoba untuk menunjukkan apakah perlindungan HAM secara langsung

mempengaruhi tingkat partisipasi politik individu dari perspektif gender. Hal ini dilakukan dengan mengontrol variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan hubungan antara perlindungan HAM dan partisipasi politik, tetapi juga untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mendasari hubungan tersebut. Studi kasus memungkinkan penelitian ini untuk mendalami ke dalam konteks spesifik di mana perlindungan HAM dan partisipasi politik menjadi relevan, serta untuk mempertimbangkan perbedaan gender dalam respons terhadap isu-isu tersebut.

PEMBAHASAN

Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan landasan yang fundamental dalam menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam konteks partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Hak asasi manusia merujuk pada hak-hak inheren dan tak terpisahkan yang dimiliki setiap individu sebagai anggota dari masyarakat yang demokratis. Secara khusus, hak-hak ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan beragama, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari beberapa aspek utama:

1. Prasyarat keterlibatan Politik

Kehidupan politik pada dasarnya bersifat konfrontatif. Warga negara mungkin lebih bergairah untuk terlibat dalam kehidupan politik ketika mereka marah dan meyakini bahwa orang lain atau pemimpin politik tidak dapat dipercaya. Ketika kesal, mereka lebih mungkin untuk mengambil tindakan langsung, salah satunya adalah menyampaikan pendapat dengan cara turun ke jalan. Keterlibatan adalah kebalikan dari isolasi, dan memang melibatkan keterlibatan dengan orang lain. Dalam mengakui suatu hubungan dengan orang lain, seseorang tidak dapat menghindar dari partisipasi aktif dengan tema-tema yang menjadi perhatian orang lain, salah satunya adalah terkait

pengesahan UU Cipta Kerja. Ini menjelaskan bahwa keterlibatan politik memfasilitasi perbedaan, dan di sisi lain mengidentifikasi kesamaan. Berpartisipasi dalam demonstrasi atau gerakan sosial yang legal atau sah, membutuhkan minat aktif dan tingkat kesukarelaan yang lebih tinggi daripada jenis keterlibatan politik lainnya, konsisten untuk berpartisipasi dalam isu sosial, serta tingkat resiko yang cukup besar. Demonstrasi atau gerakan sosial mungkin tidak bertahan cukup lama, tergantung pada tingkat perhatian dalam isu sosial dan kesukarelaan. Tetapi di sisi lain juga dapat menyebabkan kegiatan komunal terkait dalam jangka panjang.²

2. Kesetaraan dan Non Diskriminasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dengan jelas dan tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang artinya terbebas mutlak dari segala bentuk pengaruh dan intervensi dari luar baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, masyarakat dan persmaupun dari dalam Pengadilan itu sendiri terhadap penyelenggaraan peradilan. Hal ini termaktub didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan dan ayat (2) berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah konstitusi”.Kebebasan hakim atau kemandirian peradilan tidak dapat diartikan sedemikian jauh sehingga membolehkan hakim membuat aturan-aturan sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya atau memperkenankan untuk membuat putusan secara semena-mena, namun hakim berkewajiban untuk menafsirkan suatu aturan.³

3. Stabilitas Demokrasi

² Putra, H. O. A. (2020). Keterlibatan Politik: Omnibus Law dan Pilkada Serentak. *harianhaluan.com*.

³ Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 210-237.

Indonesia telah mengalami perubahan sistem demokrasi dari Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Pancasila. Indonesia mengalami banyak perubahan Sistem Demokrasi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan - kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumnya. Sehingga, bangsa Indonesia mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan beralih ke sistem demokrasi yang lain. Indonesia memilih Demokrasi Pancasila, karena Demokrasi pancasila melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaannya. Selain itu, Demokrasi Pancasila juga bersumber dari nilai dan kepribadian bangsa sendiri yang sudah melekat dengan jati diri Bangsa Indonesia⁴

Partisipasi Politik

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik⁵.

Teori partisipasi politik merupakan kerangka kerja yang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan individu dalam proses politik. Teori ini mengidentifikasi beberapa aspek penting yang dapat memengaruhi seberapa aktif individu terlibat dalam kehidupan politik suatu negara atau masyarakat. Beberapa faktor utama yang dibahas dalam teori partisipasi politik meliputi Sosio-Ekonomi dan Pendidikan, Kondisi Sosial dan Budaya, Institusi Politik, Teknologi dan Media.

Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM yang kuat memiliki dampak

⁴ Zulfa, M., Ananda Lisa, P. S., Agustya Panca, P., Waziroh Nurul, H., & Aldy Nata, M. Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan, Departemen Teknik Universitas Airlangga. adm@ pih. unair. ac. id* (Accessed on December 21, 2020).

⁵ Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta :Kencana Prenada MediaGroup

yang signifikan terhadap partisipasi politik individu, terutama dari perspektif gender:

1. Akses Terhadap Informasi Politik:

Perempuan sering kali mengalami kendala dalam mengakses informasi politik yang penting untuk membuat keputusan yang informasi dan terinformasi. Kendala-kendala ini bisa berasal dari akses terbatas terhadap media massa atau internet, serta dari kurangnya pendidikan formal atau literasi politik yang memadai di kalangan perempuan.

2. Kebebasan Berbicara dan Berkumpul

Terbatasnya kebebasan berbicara dan berkumpul dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka dan berpartisipasi dalam forum politik. Tanpa kebebasan untuk menyuarakan pendapat secara terbuka dan aman, perempuan mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan takut untuk berpartisipasi dalam diskusi politik atau demonstrasi, yang dapat mengurangi keterlibatan mereka dalam proses politik.

3. Persepsi Terhadap Kesetaraan Gender

Partisipan menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam partisipasi politik masih jauh dari optimal, dengan perempuan sering merasa tidak didengar atau diwakili dalam keputusan politik penting. Perempuan sering kali merasa tidak didengar atau diwakili dalam keputusan politik penting. Mereka mungkin menghadapi stereotip gender dan diskriminasi yang menghambat kemampuan mereka untuk maju dalam karier politik atau untuk diakui sebagai pemimpin yang kompeten dalam arena politik.

4. Dukungan Sosial dan Budaya

Budaya dan norma sosial sering kali membatasi perempuan dalam mengambil peran aktif dalam politik, meskipun ada perlindungan hukum yang tersedia. Dalam beberapa budaya, diharapkan bahwa perempuan tetap dalam peran tradisional domestik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dianggap sebagai domain laki-laki. Hal ini dapat mengurangi motivasi perempuan untuk mencalonkan diri, aktif berpartisipasi dalam kampanye politik, atau bahkan memilih untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

Implikasi Kebijakan

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya langkah-langkah kebijakan yang lebih tegas untuk memperkuat perlindungan HAM dan mempromosikan partisipasi politik yang lebih inklusif dari perspektif gender. Rekomendasi kebijakan termasuk:

1. Meningkatkan akses perempuan terhadap informasi politik melalui pendidikan dan teknologi informasi.
2. Memperkuat perlindungan hukum terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul.

Mengadopsi kebijakan afirmatif untuk mendukung partisipasi politik perempuan dalam semua tingkatan.

Tema-tema yang muncul dari temuan ini memberikan wawasan yang dalam mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan Akses Informasi

Penting untuk meningkatkan akses perempuan terhadap informasi politik yang relevan melalui pendidikan informal, pelatihan, dan pengembangan literasi politik.

2. Mempromosikan Kebebasan Berbicara dan Berkumpul

Perlindungan HAM yang kuat harus menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul bagi semua individu tanpa diskriminasi, sehingga memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan politik.

3. Mengubah Persepsi Terhadap Kesetaraan Gender

Diperlukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat dan pemimpin politik terhadap kesetaraan gender dalam politik. Ini bisa melalui kampanye kesadaran, pelatihan untuk memerangi stereotip, dan dukungan aktif untuk keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

4. Merombak Norma Budaya

Penting untuk mempromosikan budaya inklusif yang mendukung partisipasi politik

perempuan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memerangi diskriminasi dan membangun masyarakat yang lebih demokratis dan responsif.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa perlindungan HAM yang lebih kuat akan menghasilkan perubahan positif dalam partisipasi politik perempuan, membawa dampak positif bagi kesetaraan gender dan keadilan sosial secara keseluruhan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hak asasi manusia yang efektif merupakan kunci utama untuk menjamin partisipasi politik yang adil dan merata bagi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dengan memahami dampak perlindungan HAM dari sudut pandang gender, langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam arena politik. Penelitian ini memberikan landasan empiris untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan keadilan sosial secara keseluruhan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arqon, M., Mustafa, D., & Gogon, M. (2024). Pencegahan politik uang di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 12-22.
- Chandra, F. (2022). Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin Tahun 2022 Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016. *ADIL*, 4(1), 1-11.
- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum dan demokrasi Indonesia masa depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1-11.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta :Kencana Prenada MediaGroup
- Farda, L. (2024). Sosialisasi Pemilu Serentak kepada Pemilih Pemula di Kabupaten Merangin. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 117-128.
- Gultom, R., & Nainggolan, N. P. (2025). Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia: Studi kasus tentang kasus kekerasan terhadap aktivitas lingkungan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 144-153.

- Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 210-237.
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif konstitusi (studi tentang perlindungan hak asasi manusia). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3b), 892-901.
- Noviasari, D. T. (2022). Keadilan Gender di Tengah Perkembangan Politik Global dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(4), 24-32.
- Putra, H. O. A. (2020). Keterlibatan Politik: Omnibus Law dan Pilkada Serentak. *harianhaluan.com*.
- Rafiqah, M. O. (2023). HAK ASASI MANUSIA DAN TANTANGAN DEMOKRASI: SUATU PERSPEKTIF TEORITIS. *literacy notes*, 1(2).
- Sari, F. K., Arqon, M., & Bintang, A. (2025). Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Menjaga Keberlanjutan Demokrasi Berdasarkan Hukum Tata Negara. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 22-31.
- Sari, I. P. (2024). Peluang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 55-61.
- Zulfa, M., Ananda Lisa, P. S., Agustya Panca, P., Waziroh Nurul, H., & Aldy Nata, M. Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan, Departemen Teknik Universitas Airlangga*. adm@pjh.unair.ac.id (Accessed on December 21, 2020).